

**ASPEK-ASPEK YURIDIS ASURANSI TAKAFUL
(ASURANSI SYARIAH) PADA PT. ASURANSI TAKAFUL
DI KANTOR CABANG PERWAKILAN SURAKARTA**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang menakjubkan memaksa manusia supaya terus menghasilkan perubahan cara berpikir, cara hidup, cara perilaku dan bertindak. Aturan lama telah memberi tempat kepada aturan baru yang menjadikan masyarakat tani beralih kepada masyarakat industri modern. Proses industrialisasi sungguh pesatnya, sehingga tidak salah jika perubahan itu disebut sebagai revolusi, sehingga dengan revolusi tersebut akan nampak dalam suatu pembangunan bangsa yang bisa diukur dari keberhasilan pembangunan yang telah meningkat diseluruh sektor kehidupan baik ekonomi, sosial, maupun politik. Adapun pembangunan nasional itu sendiri mempunyai tujuan ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Guna mewujudkan tujuan tersebut pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan termasuk bidang ekonomi dan keuangan nasional dewasa ini menunjukkan semakin menyatu dengan ekonomi regional dan bahkan internasional.

Keberhasilan dalam pembangunan telah meningkatkan derajat kehidupan bangsa secara keseluruhan, terlepas dari berbagai kekurangan yang masih ada, kemajuan di bidang ekonomi tentu akan mengakibatkan juga terjadinya perubahan di berbagai sektor kehidupan sosial. Tak bisa disangkal bahwa pembangunan ekonomi secara besar-besaran yang dijalankan sejak awal orde baru, telah berhasil mengangkat taraf hidup bangsa Indonesia secara keseluruhan. Peningkatan taraf hidup ini tidak saja dari indikator sosial tetapi terlebih lagi dari indikator ekonomi yang terus menerus semakin membaik. Namun ketika krisis datang mengakibatkan pembangunan tidak menguntungkan. Krisis moneter yang berkembang menjadi krisis ekonomi, sosial, dan politik telah mendudukan kembali para penguasa pada posisi yang sangat sulit. Krisis yang terjadi ini merupakan konsekuensi logis dari lepasnya keterkaitan sektor moneter dengan sektor riil. Sektor moneter menjadikan uang sebagai barang komoditas, sedangkan sektor riil selalu tertinggal di belakang karena adanya kebutuhan waktu untuk memproses barang dari in put menjadi out put.¹

Dengan sistem Baratlah asuransi yang selama ini ada di Indonesia di jalankan dan dioperasionalkan baik melalui lembaga-lembaga asuransi ataupun bidang perekonomian di Indonesia. Asuransi dengan sistem pemikiran Barat ini dapat dikelola oleh orang-orang Indonesia maupun orang asing walaupun Indonesia yang penduduk mayoritasnya beragama Islam bisa menerima secara wajar asuransi ini. Sehingga asuransi di Indonesia sampai sekarang mengalami perkembangan yang cukup pesat baik di tingkat nasional maupun internasional.

¹ Zaenal Arifin, *Memahami Bank Syariah, lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*, Alvabet, Jakarta, 1999, hal vi.

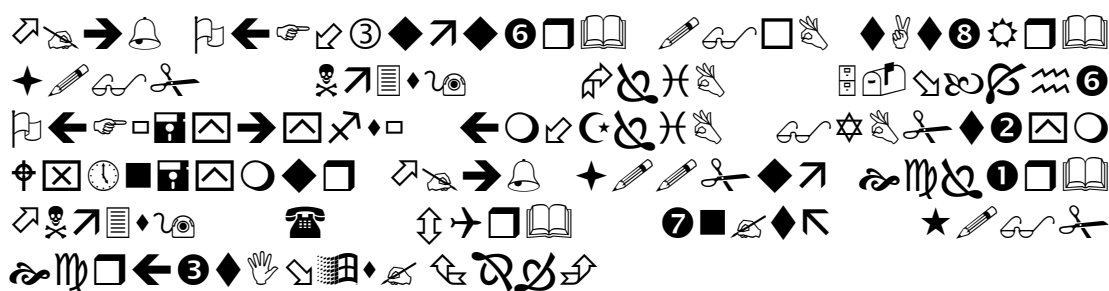
Adapun yang menjadi persoalan adalah apakah asuransi dengan sistem pemikiran Barat tersebut dapat diterima atau tidak dalam tradisi Islam atau Hukum Islam selama ini. Secara kelembagaan Islam menerima tetapi secara substansi masih dipertentangkan apakah asuransi tersebut bertentangan atau tidak dengan Hukum Islam.

Berdasarkan keadaan perekonomian Indonesia pada saat ini yaitu dalam bidang asuransi, umat Islam tertarik dengan institusi perekonomian yang membawa mereka maju di dunia modern ini, asalkan tidak ada dari sifat dasar institusi itu yang tidak selaras dengan semangat agama dan prinsip Hukum Islam. Tetapi persoalan yang hangat dibicarakan di dunia Islam dewasa ini mengenai perasuransian adalah apakah asuransi itu halal atau haram. Berbagai pendapat telah dikemukakan untuk menghadapi persoalan ini sehingga terdapat tiga golongan kaum muslim dengan tiga pendirian yang berbeda-beda. Golongan pertama berpendapat bahwa asuransi boleh dalam semua bentuk; golongan kedua menolak secara keseluruhan; golongan ketiga setuju dalam beberapa bentuk saja.

Sebenarnya sistem perekonomian yang dijalankan oleh umat Islam sudah ada kira-kira pada abad kedua hijriyah, pelaku bisnis dari kaum muslim yang kebanyakan para pelaut telah melaksanakan kerja sama atau tolong-menolong untuk mengatasi berbagai kejadian dalam menopang bisnis mereka, layaknya seperti mekanisme asuransi. Kerja sama ini mereka lakukan untuk membantu mengatasi kerugian bisnis, diakibatkan musibah yang terjadi semisal tabrakan, tenggelam, terbakar atau akibat serangan penyamun. Sekitar tujuh abad kemudian sistem ini diadopsi oleh para pelaut Eropa dengan melakukan investasi atau

mengumpulkan uang bersama dengan sistem membungakan uang. Kemudian pada abad ke sembilan belas cara membungakan ini pun menjelajahi penjuru dunia, terutama setelah dilakukan para orang Yahudi. Pada penghujung abad ke dua puluh hijriyah, para pakar ekonomi muslim mulai mengembangkan konsep ekonomi Islam. Mereka adalah rangkaian emas dari Abu Yusuf menghasilkan Al-Kharaj dan Abu' Ubaid yang mengatakan bahwa asuransi adalah salah satu lembaga ekonomi yang menjadi perhatian khusus oleh pakar muslim pada waktu itu, sehingga konsep yang menggunakan format *maisir*, *gharar*, dan *riba* yang berjalan selama ini mesti diubah menjadi sistem bagi hasil.

Sistem bagi hasil yang ada dalam lembaga asuransi syariah dengan meniadakan unsur *maisir*, yaitu untung-untungan untuk mendapatkannya. *Gharar*, yaitu penipuan atau ketidakjelasan, baik ketidakjelasan pada persentase ataupun waktu mendapatkannya. *Riba*, yaitu mendapat tambahan jumlah dengan tanpa ada imbalan yang sah, ataupun keikhlasan sejati pemiliknya. Sistem bagi hasil adalah merupakan dasar dari adanya konsep tolong-menolong dalam berasuransi. Sistem tersebut dipakai dalam konsep operasional asuransi syariah yaitu bagaimana cara pembagian keuntungannya. Selama ini sistem asuransi yang dijalankan dengan konsep Barat dirasakan kurang memberikan kejelasan dalam pembagian keuntungan tersebut. Maka dengan penduduk hampir 90 % bangsa Indonesia adalah beragama Islam diperlukan adanya suatu lembaga perekonomian dengan sistem syariah.



Artinya: “Katakanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal".
Katakanlah: "Apakah Allah Telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah ?"
Qs. Yunus 59²

Kebutuhan akan kehadiran jasa asuransi yang berdasarkan syariah diawali dengan mulai beroperasinya bank-bank syariah. Hal tersebut sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan ketentuan pelaksanaan bank syariah. Untuk itulah pada tanggal 27 Juli 1993, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muammalat Indonesia (BMI) dan perusahaan Asuransi Tugu Mandiri sepakat memprakarsai pendirian Asuransi Takaful, dengan menyusun Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI).

TEPATI telah merealisasikan berdirinya PT. Syarikat Takaful Indonesia sebagai Holding Company, yang terdiri dari dua anak PT. Asuransi Takaful, yaitu perusahaan PT. Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) dan PT. Asuransi Takaful Umum (Asuransi Takaful Kerugian). Dibentuknya dua perusahaan tersebut, adalah untuk mengikuti ketentuan UU No. 2 Tahun 1992 tentang usaha

² Al Qur'an, *Qs. Yunus ayat 59*.

perasuransian, dimana perusahaan asuransi jiwa dan asuransi kerugian harus didirikan secara terpisah.³

Pendirian dua anak perusahaan PT. Syarikat Takaful Indonesia adalah dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam BAB III Pasal 3 UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian pada poin a, yang berbunyi:⁴

- a. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
- b. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungan .
- c. Usaha asuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang aspek-aspek yuridis Asuransi Takaful dan kenyataan yang terjadi di lapangan dalam bentuk sebuah penulisan hukum dengan judul :

“ASPEK-ASPEK YURIDIS ASURANSI TAKAFUL (ASURANSI SYARIAH)
PADA PT. ASURANSI TAKAFUL DI KANTOR CABANG PERWAKILAN
SURAKARTA”.

³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Islam, Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta, 2004, hal 718

⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 84.

B. Perumusan Masalah.

Dalam suatu kegiatan penelitian untuk memfokuskan permasalahan yang akan dikaji diperlukan rumusan masalah. Sebab dengan adanya rumusan masalah akan memudahkan peneliti untuk melakukan pembahasan searah dengan tujuan yang ditetapkan. Perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi aspek yuridis dalam Asuransi Takaful ?
2. Bagaimana sistem operasional dan pembagian keuntungan dalam Asuransi Takaful ?
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Asuransi Takaful ?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Ingin mengetahui aspek yuridis dalam Asuransi Takaful.
2. Ingin mengetahui sistem operasional dan pembagian keuntungan dalam Asuransi Takaful.
3. Ingin mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Asuransi Takaful.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a) Dapat menambah khasanah pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

- b) Untuk mendapatkan tambahan pemikiran yang dapat digunakan mengembangkan bahan perkuliahan yang telah ada.
- c) Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

2. Manfaat Praktis

- a) Dapat dipakai sebagai masukan bagi para pihak dalam pelaksanaan Asuransi Takaful
- b) Untuk memberikan informasi pada masyarakat mengenai seluk beluk Asuransi Takaful .

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, artinya penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin⁵ berdasarkan pada Asuransi Takaful.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kenyataan yang terjadi di lapangan⁶. Maksudnya, hukum yang dibuat oleh para ahli hukum

⁵ Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal 15-16.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1998, hal 26.

dipergunakan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat⁷.

3. Data dan Sumber Data

Ada dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder, dengan uraiannya sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung pada nara sumber atau responden yang bersangkutan, dalam hal ini pihak manajemen PT. Asuransi Takaful Cabang Perwakilan Surakarta yang diwakili oleh unit pemasaran Asuransi Takaful Cabang Perwakilan Surakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data lain yang berhubungan dengan peneliti, berupa bahan-bahan pustaka. Fungsi data sekunder untuk mendukung data primer. Data sekunder yang berkaitan dengan penelitian, meliputi :

- Al Qur'an, Hadist, dan Ijtihad
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- PP Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

⁷ H.B Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Pusat Penelitian UNS, Surakarta, 1994, hal 37.

- Kitab Undang-undang Hukum Dagang
- Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian
- Karya Ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis data, maka metode untuk mengumpulkan data disesuaikan dengan jenis data, untuk mengumpulkan data primer digunakan metode observasi dan wawancara, sedangkan untuk data sekunder menggunakan metode studi pustaka. Penjelasan dari 3 metode pengumpulan data tersebut sebagai berikut :

a. Metode Observasi

Metode untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan kegiatan pengamatan secara langsung pada obyek penelitian. Metode ini digunakan saat mengamati aktivitas para karyawan dan pengguna jasa serta hasil pengamatan yang penting dicatat sebagai bahan untuk membuat laporan dan menganalisis data.

b. Metode Wawancara

Metode untuk mengumpulkan data dengan cara tanya jawab, peneliti sebagai penanya dan Kepala PT. Asuransi Takaful, dapat diwakili unit pemasaran PT. Asuransi Takaful untuk menjawab pertanyaan. Selain itu peneliti juga melakukan tanya jawab kepada peserta Asuransi Takaful tersebut. Pedoman daftar pertanyaan dibuat secara sistematis dan telah disiapkan oleh peneliti.

c. Metode Studi Pustaka

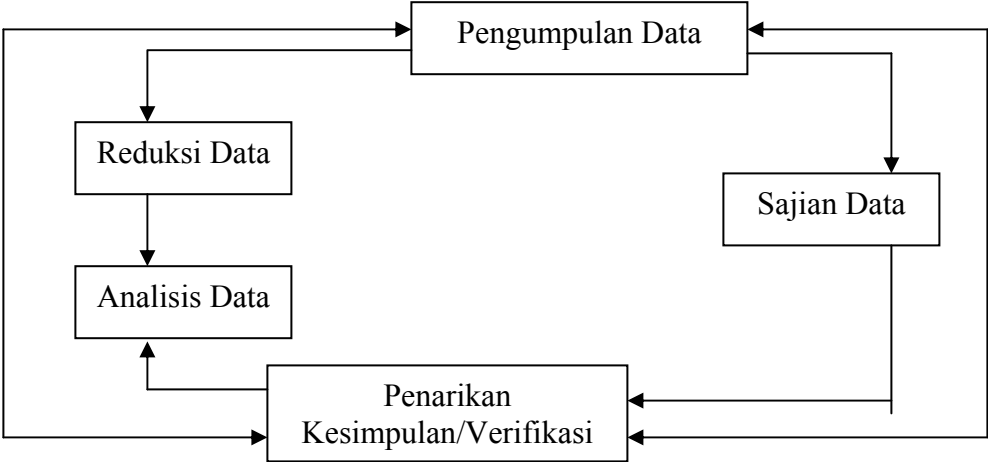
Benda-benda yang berbentuk tulisan. Jadi metode studi pustaka adalah metode untuk mengumpulkan data berdasarkan pada benda-benda berbentuk tulisan, dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari, dan memahami data-data sekunder yang berhubungan dengan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

5. Metode Analisis Data

Data dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif, karena data yang ada bersifat kualitatif. Dengan analisis secara interaktif, maka data akan diproses melalui tiga komponen yang terdiri dari :

- a. Reduksi data, merupakan proses seleksi penyederhanaan dari data yang telah ada.
- b. Sajian data, merupakan rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dilakukan
- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, adalah pengumpulan data penelitian dimulai dengan memahami apa yang ditemui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan preposisi-preposisi.

Model analisis interaktif tersebut dapat diperjelas dengan gambar berikut ini⁸:



Untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu semua metode dalam menganalisis data berawal dari fenomena-fenomena khusus menuju pada fenomena-fenomena umum. Maksudnya fenomena tersebut berdasarkan norma-norma di PT. Asuransi Takaful Keluarga, kemudian dikaitkan dengan Al Qur'an dan Hadist serta Undang-undang secara umum.

Cara pengolahan data yang dilakukan dengan menggabungkan metode wawancara dan studi pustaka dengan peraturan perundang-undangan (hukum positif), serta Al-Qur'an, Hadist, dan Ijtihad kemudian diambil suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan dalam skripsi.

⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2001, hal 45.

F. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Asuransi Takaful
 - a. Prinsip-prinsip Dalam Asuransi Takaful
 - b. Manfaat-manfaat Dari Asuransi Takaful
 - c. Bentuk-bentuk Di Dalam Asuransi Takaful
 - d. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Takaful
 - e. Pembinaan Dan Pengawasan Asuransi Takaful
- B. Tinjauan Tentang Landasan Syariah Asuransi Takaful Dan Tinjauan Tentang Riba
- C. Tinjauan Tentang Perjanjian Di Dalam Asuransi Takaful.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Deskripsi Lokasi Penelitian
- B. Apa Yang Menjadi Aspek Yuridis Dalam Asuransi Takaful
- C. Sistem Operasional Dan Pembagian Keuntungan Dalam Asuransi Takaful.

D. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Asuransi
Takaful

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN